

# Buletin Parlementaria

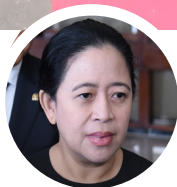


## Perkuat Pengamanan dan Berantas Tindak Pidana di Lokasi Wisata

Nomor 1248/V/V/2023 • Mei 2023



9 772614 339005



3 Pemerintah  
Diminta Segera  
Terbitkan Aturan  
Pelaksana UU  
TPKS



21 Revisi UU  
Ombudsman RI  
Untuk Perkuat  
Tupoksi Lembaga



# Perkuat Pengamanan dan Berantas Tindak Pidana di Lokasi Wisata



Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khaerul Saleh saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III dengan Kapolda NTB dan Kakanwil Kemkumham NTB beserta jajaran, di Lombok, NTB, Kamis (25/5/2023).

**W**akil Ketua Komisi III Pangeran Khaerul Saleh mengatakan ada dua hal yang menjadi sorotan Komisi III dalam pengamanan kawasan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dua hal tersebut berkaitan dengan peredaran narkoba dan tindak pidana yang dilakukan wisatawan di NTB. Seperti diketahui, NTB memiliki destinasi pariwisata prioritas Mandalika dan destinasi wisata lainnya.

Berkaitan dengan peredaran narkoba dan obat/bahan berbahaya (narkoba), Pangeran berharap Kepolisian Daerah NTB dan *stakeholder* terkait dapat menjaga NTB agar tetap aman dari peredaran narkoba. Sebab, dengan banyaknya destinasi wisata di NTB, berarti menambah pula pergerakan wisatawan ke NTB yang dikhawatirkan menjadi pintu masuk peredaran narkoba.

"Sebagai daerah wisata nasional, kami harap jangan sampai wilayah ini menjadi tempat peredaran narkoba. Jadi kami minta kepada Bapak Kapolda beserta jajaran beserta seluruh masyarakat untuk ekstra, jangan sampai wilayah NTB ini yang disebut dengan daerah religius, karena (ulah) wisatawannya bisa menjadi sarang narkoba," ujar Pangeran usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III dengan Kapolda NTB dan Kakanwil Kemkumham NTB beserta jajaran, di Lombok, NTB, Kamis (25/5).

Selain itu, Komisi III dalam

”

**SEBAGAI DAERAH WISATA NASIONAL, KAMI HARAP JANGAN SAMPAI WILAYAH INI MENJADI TEMPAT PEREDARAN NARKOTIKA.**

kunjungan tersebut juga menyoroti perihal tindak pidana yang dilakukan oleh wisatawan yang melakukan perbuatan melawan hukum di NTB. Menurut Politisi Fraksi PAN ini, Kepolisian dan *stakeholder* terkait harus bertindak humanis kepada wisatawan. Seperti misalnya dengan tidak memproses pengadilan pada Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

"Kalau ada tindak pidana ringan yang dilakukan oleh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yang mana tadi saya baca menurut target Pemerintah NTB ditargetkan lokal maupun mancanegara itu 4,5 juta (wisatawan). Jadi kalau ada pelanggaran yang biasa, jangan langsung proses pengadilan Pak Kapolda, karena kalau nanti semuanya dipidana, orang akan takut ke NTB," pesan Pangeran.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda NTB Djoko Poerwanto mengatakan penanganan terhadap peredaran narkoba merupakan tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, ia berharap masyarakat juga ikut serta dalam pemberantasan peredaran narkoba. Seperti dengan melaporkan jika melihat atau mengetahui adanya peredaran narkoba.

"Intinya begini, apapun informasinya, kasih kita informasi. Karena target dari direktorat narkoba adalah membuat peredaran gelap narkoba itu seperti pohon. Jadi pohon itu ada batangnya ada akarnya ada daunnya, ada semuanya, sehingga pada saat pemberantasan kita sama-sama bekerja sama untuk saling melengkapi. Itu yang paling penting," jelas Djoko. [bia/rdn](https://www.bia.rdn)

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Pemerintah Diminta Segera Terbitkan Aturan Pelaksana UU TPKS



FOTO: ENO/PDT

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan Lodewijk F. Paulus.

**K**etua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendorong pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksana sebagai implementasi atas Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sejak disahkan setahun lalu, penerapan hukuman terhadap pelaku serta perlindungan bagi korban kekerasan seksual masih terhambat karena belum ada aturan teknisnya.

"Pemerintah harus memberi dukungan untuk memastikan penghapusan kekerasan seksual, yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak. Aturan pelaksana sebagai implementasi atas penerapan UU TPKS harus segera diterbitkan," kata Puan, Rabu (24/5).

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat, kasus kekerasan seksual menjadi yang terbanyak dilaporkan pada tahun 2022.

Terdapat 2.228 kasus yang memuat kekerasan seksual atau 65 persen dari total 3.422 kasus kekerasan berbasis gender. Terbaru, ditemukan kasus kekerasan seksual terhadap 41 santri di pondok pesantren di Sakra Timur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah menjadi fenomena gunung es. Jangan sampai perjuangan kami di DPR, perjuangan para aktivis dan seluruh elemen bangsa lainnya sampai akhirnya UU TPKS terealisasi menjadi sia-sia," ujar Puan.

DPR pun menyoroti perlunya aturan pendukung untuk penanganan korban kekerasan dari sisi psikologis yang dapat diberikan Pemerintah. Puan meminta komitmen Pemerintah dalam mempercepat penerbitan aturan teknis demi efektivitas UU TPKS.

**aha**



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**  
Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)  
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**  
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,  
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**  
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhien Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbari, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firda Dysie, Balegys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

**FOTOGRAFER**  
Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budlati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldidi Opie, Hasni Mentari, Friederick Munchen

**ANALIS MEDIA**  
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widjowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

**IT MEDIA DIGITAL**  
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Ria Damayanti

**ADMINISTRASI**

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Gus Imin Dukung Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

**W**akil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan rakyat (Korkesra)

Abdul Muhaimin Iskandar mendukung pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap alokasi dan penyaluran anggaran pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2022-2023. Hal ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas anggaran dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

Pria yang akrab disapa Gus Imin ini secara khusus menyoroti koordinasi antarlembaga negara yang masih tumpang tindih dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, hal ini berpotensi membuat program pengentasan kemiskinan tidak berjalan optimal, terutama kemiskinan ekstrem.

"Saya kira sudah waktunya diubah, dievaluasi pola dan sistem pengentasan kemiskinan yang ditetapkan selama ini, terutama kemiskinan ekstrem yang nyatanya masih ada di negara ini. Satu langkah konkret yang harus segera dilakukan adalah harmonisasi koordinasi antarlembaga negara, jangan jalan sendiri-sendiri mengatasi masalah besar ini," tutur Gus Imin dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/5)

Gus Imin setuju dengan pendapat Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga menginginkan adanya evaluasi terhadap program tersebut. Ia menilai penyempurnaan data kantong-kantong kemiskinan serta data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) memang harus terus disempurnakan.



Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar.

Di sisi lain Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Dinas Sosial, Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mendata masyarakat miskin yang belum menjadi peserta BPJS dan menyalurkan bantuan iuran BPJS bagi yang berhak.

Ia pun menegaskan agar pemerintah kembali melakukan pengecekan pasca pemberian bantuan. Disampaikannya, pemerintah harus melakukan pengecekan ulang dan memastikan penerima memang layak dibantu. Bahkan secara gamblang ia mengusulkan untuk dilakukan penarikan bantuan apabila terbukti tidak tepat sasaran.

"Evaluasi alokasi berbagai subsidi dan bantuan yang dikeluarkan ini juga penting dilakukan. Jangan karena bantuan sudah disalurkan ke penerima terus pemerintah diam saja, cek lagi dan kalau terindikasi salah sasaran ya ambil lagi bantuannya, serahkan kepada yang berhak," tegas Cak Imin.

Sebelumnya Wapres Ma'ruf Amin menggelar rapat pleno tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Istana Wapres, Jakarta Pusat pada Rabu (25/5). Dalam kesempatan itu, Wapres menyinggung perbedaan data kemiskinan antara Bank Dunia dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

[uc/rdn](https://www.ri.go.id/uc/rdn)

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPID Sumut Perlu Kawal Informasi Pemilu 2024 yang Baik dan Netral

**P**emungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) presiden 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. Sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan digelar pada 27 November 2024. Karena itu, Komisi I DPR RI menilai perlu adanya dorongan dan pengawasan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara (Sumut) agar informasi mengenai Pemilu dan Pilkada tersebut dapat tersebar dengan baik dan juga netral.

Di sisi lain, Komisi I menilai perlu adanya edukasi kepada seluruh lembaga penyiaran. Baik yang berbentuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP) ataupun Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) agar tidak ada berita hoaks, kampanye hitam, ataupun informasi yang merugikan satu pihak. Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid yang memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I ke Medan, Sumatera Utara. Pertemuan ini dalam rangka mendapatkan penjelasan secara komprehensif tentang "Peran Pemkot Medan bersama KPID dalam mengawal informasi Pemilu 2024 yang terpusat dan terintegrasi".

"Perlu adanya dorongan dari LPP dan juga LPS untuk mendorong tingkat partisipasi yang lebih banyak di masyarakat, membuat Pemilu menjadi menarik dan menjadikan pemilihan umum menjadi sebuah pesta demokrasi yang betul-betul meriah," jelas Meutya di Medan, Kamis (25/5). Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wali Kota Medan



FOTO: RSB/PDT

**Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I ke Medan, Sumatera Utara.**

Muhammad Bobby Afif Nasution, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara, Anggia Ramadhan, Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan beberapa catatan khususnya untuk Kota Medan. Bahwa diharapkan KPID bisa bekerja sama dengan para kepala daerah untuk membuat kegiatan literasi. Palsanya, waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah kian dekat, sehingga perlu dilakukan kegiatan tersebut bersama masyarakat guna memberikan edukasi tentang Pemilu dan Pilkada secara baik dan lugas.

Meutya menambahkan perlu adanya kerja sama antara KPID

dengan para kepala daerah. Oleh karena, menurutnya, kalau KPID bekerja sendiri tidak sanggup karena keterbatasan personel yang juga harus mengawasi siaran televisi siaran. Karena itu, Meutya berharap perlu adanya sinergitas antara pihak-pihak terkait demi kesuksesan Pemilu 2024.

Politisi dari Dapil Sumut I menilai partisipasi masyarakat terhadap Pemilu dan Pilkada 2024 masih belum sesuai harapan. Karena itu, Komisi I ingin sekali KPI bisa mendorong tingkat partisipasi itu dengan membuat tayangan-tayangannya yang lebih edukatif, seperti ajakan pemilu atau dengan tayangan yang adil dan tidak memihak. rni/rdn

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# KPID Jatim Dinilai Optimal Kawal Informasi dalam Persiapan Pemilu yang Terpusat dan Terintegrasi

**A**nggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengapresiasi kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur (Jatim) dalam mengawal informasi dalam persiapan Pemilu yang terpusat dan terintegrasi. Sebagai wujud dalam menyukseskan Pemilu, KPID Jatim turut mendorong lembaga penyiaran di Jatim melalui konten-konten yang dapat mewujudkan pemilu damai dan tidak menyebarkan fitnah.

"KPID Jatim sudah melaksanakan tugasnya secara optimal sesuai dengan anggaran yang didapat bahkan hanya sebesar Rp1,5 miliar per tahun. Tentu ini menjadi perhatian kita ke depan, kesetaraan anggaran perlu didorong bukan hanya di Jatim tapi juga KPID di seluruh wilayah Indonesia," jelas Hasanuddin usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke kota Surabaya, Jatim, Kamis (25/5).

Peningkatan anggaran lanjutnya, penting untuk didorong agar terciptanya monitoring terhadap isi siaran yang maksimal dengan alat monitoring serta tenaga pengawas yang mampu melingkupi luas wilayah dan banyaknya lembaga penyiaran di seluruh wilayah Indonesia.

"Karena seperti apapun kemampuan dan pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya, faktor anggaran tetap harus menjadi perhatian kita semua, tentu ini dilakukan agar KPID Jatim khususnya mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik dalam menghadapi pemilu yang akan datang," ungkap

Politisi PDI-Perjuangan itu.

Di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait Revisi UU Penyiaran yang diharapkan kedepannya mampu memberi penguatan fungsi dan peran KPI Pusat dan KPID Jatim khususnya

”

**KPID JATIM SUDAH MELAKSANAKAN TUGASNYA SECARA OPTIMAL SESUAI DENGAN ANGGARAN YANG DIDAPAT BAHKAN HANYA SEBESAR RP1,5 MILIAR PER TAHUN.**

dalam menciptakan komunitas penyiaran yang sehat dan berkualitas. "Terkait masukan-masukan terhadap RUU penyiaran kami akan kumpulkan dan kalau perlu kami akan mengundang ke Jakarta agar RUU Penyiaran ini nantinya bisa lebih sempurna," imbuh Hasanuddin.

Pada kesempatan yang sama Ketua KPID Jatim Yosua Immanuel mengungkapkan, melalui kunjungan spesifik Komisi I DPR RI ke Jatim memberikan kekuatan khususnya kepada KPID Jatim untuk bekerja semakin optimal meskipun di tengah keterbatasan anggaran. Untuk itu dirinya berharap revisi terhadap RUU Penyiaran dapat membuat peran KPID kedepannya mampu menjadi lebih optimal. — pun/aha



FOTO:TRAV/PDI

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke kota Surabaya, Jatim, Kamis (25/5/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Teddy Setiadi Terima Curhat Uang Purnabakti KPU Periode 2012-2017 Belum Dibayar

**T**im Kunjungan Kerja Komisi II DPR menerima curhat dari jajaran KPU Kota Sukabumi, perihal belum juga dibayarkannya uang purnabakti penghargaan untuk Ketua dan Anggota KPU Periode 2012-2017. Bahkan, sampai-sampai Ketua KPU pada periode yang sebelumnya itu sudah meninggal, tapi belum juga dibayar negara.

"Menurut saya pemerintah telah zalim, karena uang purnabakti itu sampai saat ini belum dibayar

juga. Padahal, pembayaran ini sudah masuk ke dalam aturan perundang-undangan. Jadi ini sudah menjadi kewajiban dari pemerintah. Apalagi ketua KPU Kota Sukabumi sebelumnya sudah meninggal tapi pemerintah belum juga bayar," ujar Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi saat mengikuti Tim Kunker Komisi II DPR mengunjungi Kantor Wali Kota Sukabumi terkait persiapan pemilu di Kota Sukabumi, Rabu (24/5).

Politisi F-PKS ini lalu menambahkan, untuk penyelenggaraan pemilu yang anggarannya sampai triliunan bisa dianggarkan. Selain itu juga untuk menutupi kasus jiwassraya, kereta cepat dan pembangunan lain uangnya ada.

"Menurut saya tidak ada alasan logis apapun dari pemerintah jika tidak ada anggarannya untuk membayar uang purnabakti

Ketua dan Anggota KPU RI, KPU provinsi dan kabupaten/kota periode 2012-2017. Jadi ini bukan persoalan uangnya tidak

”

**MENURUT SAYA TIDAK ADA ALASAN LOGIS APAPUN DARI PEMERINTAH JIKA TIDAK ADA ANGGARANNYA UNTUK MEMBAYAR UANG PURNABAKTI KETUA DAN ANGGOTA KPU RI, KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA PERIODE 2012-2017.**

ada, tapi *good will* atau niat baik keberpihakan pemerintah buat membayar yang belum ada," ucap Legislator Dapil Jabar I ini.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Kota Sukabumi, Sri Utami mengatakan, pihaknya minta tolong diperjuangkan kepada Komisi II DPR, agar uang kehormatan purnabakti Ketua dan Anggota KPU Kota Sukabumi periode sebelumnya bisa segera dibagikan oleh pemerintah.

"Saya selaku ketua KPU Kota Sukabumi periode yang baru ini suka ditanyakan oleh ahli waris Ketua KPU yang lama, kapan dana kehormatan purnabakti bisa dibayarkan oleh pemerintah. Untuk itu, saya sedikit curhat kepada Tim Kunjungan Komisi II DPR, mohon diperjuangkan untuk pencairan dana ini, karena ini sudah menjadi kewajiban dari pemerintah dan secara regulasinya sudah diatur dalam UU," harap Sri. **jk/aha**

FOTO:JKK/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi saat mengikuti Kunker Komisi II DPR mengunjungi Kantor Walikota Sukabumi, Rabu (24/5/2023).

# lip Miftahul Choiri: Sosialisasi Pemilih Milenial di Pandeglang Harus Dimaksimalkan

**A**nggota Komisi II DPR RI lip Miftahul Choiri mendorong KPU Pandeglang dan jajarannya responsif terkait Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan saat Pemilu diselenggarakan. Hal tersebut diungkapkan lip saat mengikuti pertemuan dengan Bupati Pandeglang, KPU Kabupaten Pandeglang, Bawaslu Kabupaten Pandeglang dan Perwakilan Kementerian Dalam Negeri di Kantor Bupati Pandeglang, Rabu (24/5).

"DP4 ini menjadi informasi penting adanya potensi penambahan pemilih baru yang memenuhi persyaratan karena usianya sudah menginjak usia 17 tahun saat Pemilu diselenggarakan. Hal ini membutuhkan kesigapan pihak terkait untuk memfasilitasi ketersediaan blanko seperti saat mereka akan membuat e-KTP," tukas lip Miftahul Choiri yang berasal dari Dapil Banten I meliputi Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Politisi Fraksi PPP ini menilai pentingnya potensi para pemilih milenial (muda) ini dengan difasilitasi ketersediaan blanko e-KTP serta sosialisasi kesadaran untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024. "Bagaimana koordinasi dan sinergi yang dilakukan KPU dan Bawaslu dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, misalnya dalam melakukan sinkronisasi DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) untuk mendapatkan data pemilih komprehensif, akurat, dan

”

**DP4 INI MENJADI INFORMASI PENTING ADANYA POTENSI PENAMBAHAN PEMILIH BARU YANG MEMENUHI PERSYARATAN KARENA USIANYA SUDAH MENGINJAK USIA 17 TAHUN SAAT PEMILU DISELENGGARAKAN. HAL INI MEMBUTUHKAN KESIGAPAN PIHAK TERKAIT UNTUK MEMFASILITASI KETERSEDIAAN BLANKO SEPERTI SAAT MEREKA AKAN MEMBUAT E-KTP.**

mutakhir untuk pemilu dan pilkada serentak tahun 2024," tandas lip.

Dirinya menambahkan bahwa data kependudukan itu menjadi bahan dalam penyusunan daftar pemilih. Sehingga ketidakakuratan pada data kependudukan tentu saja bakal berdampak ke data pemilih sekalipun KPU sudah melakukan pencocokan dan penelitian atas daftar pemilih sebelum ditetapkan. Dengan kondisi demikian, maka Komisi II

DPR RI menginginkan agar data pemilih yang tidak akurat itu tidak terulang lagi pada pemilu dan pilkada serentak pada 2024 mendatang," pungkasnya.

Plt Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Ahmadi menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Pandeglang telah menggelar pelaksanaan Coklit di seluruh wilayah kabupaten pandeglang mulai tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023. "Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) mendatangi masing-masing rumah tempat tinggal pemilih, untuk memastikan calon pemilih yang sudah atau belum masuk dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang dikeluarkan pemerintah memenuhi syarat untuk memilih," jelasnya.

— oji/aha



FOTO: OJI/PPT

Anggota Komisi II DPR RI lip Miftahul Choiri saat mengikuti pertemuan di Kantor Bupati Pandeglang, Rabu (24/5/2023).





# Komisi III Minta Kapolda Metro Jaya Netral dan Profesional Tangani Masalah Apartemen GCM

**W**akil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen (Pol) Karyoto. Dalam rapat ini, Komisi III meminta Kapolda Metro Jaya untuk netral dan profesional dalam menangani permasalahan Apartemen Graha Cempaka Mas (GCM), Kemayoran, Jakarta Pusat. Hal itu agar tidak terjadi pembicaraan yang tidak sesuai fakta dan merusak citra dari institusi kepolisian.

Dia meminta permasalahan ini bisa diselesaikan secara damai tanpa melibatkan pihak lain untuk ikut campur dalam masalah ini. Komisi III, tegasnya, pun berencana mempertemukan semua pihak yang bersengketa, termasuk pihak Saurip Kadi untuk ikut ke dalam rapat selanjutnya.

"Kira-kira bisa ketemu Pak Saurip Kadi gak untuk kita bahas? Kalian merancang, mau ketemu nggak, kalau gak ketemu kita biarin aja Pak Kapolda. Ini kan jadi perdata," papar Desmond di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).

Diketahui, permasalahan apartemen GCM ini muncul lantaran terdapat dualisme kepengurusan pengelolaan Apartemen GCM. Pengurus pertama diwakili oleh Pihak PT Duta Pertiwi selaku pengelola yang ditunjuk oleh perhimpunan pemilik rumah susun campur (PPRSC) kubu Heri Wijaya buka suara. Sedangkan, pengurus kedua diinisiasi oleh Tony Soenanto dan Mayjen (Purn) Saurip Kadi membentuk Forum Komunikasi

Warga (FKW).

Dalam perjalanannya, sesuai dengan UU rumah susun, terbentuk PPRSC GCM SK Gubernur Nomor 1209 Tahun 2000. PPRSC GCM ini lalu menunjuk badan pengelola yaitu PT Duta Pertiwi sebagai pengelola sejak tahun 2000-2012 untuk mengelola IPL (Luran Pengelola Lingkungan) ataupun *service charge* air dan listrik. Kemudian pada tahun 2013 PPRSC GCM mengumumkan rencana kenaikan IPL dan PPN. Sekelompok warga yang tidak setuju atas kenaikan tersebut lalu membentuk FKW tersebut.

Atas persoalan ini, Komisi III menghendaki agar persoalan kisruh warga apartemen Graha Cempaka Mas, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dengan Pengelolaanya yaitu PT Duta Pertiwi Tbk bisa selesai dengan

damai. "Pada prinsipnya kita ingin ini bisa diselesaikan. Mungkin agak enaknyanya bisa nggak diselesaikan atau pula penyelesaian menurut PT Duta Pertiwi itu, kalau memang ada pemikiran untuk menyelesaikan kira-kira mau ke mana penyelesaian ini. Kalau begini terus ya tidak akan selesai," jelas Desmond.

Politisi dari Fraksi partai Gerindra ini pun menegaskan, tugas aparat agar tetap netral. "Ini yang tidak boleh. Apalagi ada statement tentang state terrorism itu ya. Negara jadi teroris dari kasus apartemen kan lucu banget gitu. Negara ini tidak boleh jadi terorisme di dalam rangka urusan apartemen. Muncul kalimat ini ini yang menurut saya merusak institusi kepolisian ya, kita jaga ini," tandas Desmond.

ssb,fb/rdn



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat memimpin RDP dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen (Pol) Karyoto.

FOTO: RSB/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi V Pertanyakan Langkah Penguatan Infrastruktur dan Peralatan Klimatologi di NTB



FOTO: AYU/PDT

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat foto bersama usai kunjungan kerja spesifik Komisi V Ke kantor BMKG Nusa Tenggara Barat, Kamis (25/5).

**K**omisi V DPR RI mempertanyakan langkah-langkah penguatan dan pengembangan infrastruktur, peralatan, operasional Meteorologi dan Klimatologi dari BMKG Nusa Tenggara Barat (NTB). Dimana peran BMKG sangat penting dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional sangat strategis. Khususnya menyangkut keselamatan jiwa dan harta.


"Karena itu kami datang ke NTB ini untuk mendapat penjelasan terkait langkah-langkah penguatan dan pengembangan infrastruktur, peralatan, operasional yang telah dilakukan oleh BMKG Provinsi NTB,"

ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V Ke kantor BMKG Nusa Tenggara Barat, Kamis (25/5).

Terlebih lagi, lanjut Ridwan, Provinsi NTB merupakan daerah yang berpotensi terjadi berbagai bencana alam seperti gempa, tsunami, gunung meletus dan cuaca ekstrem (longsor dan banjir). Selain itu NTB juga kerap menjadi destinasi wisata Mancanegara untuk dijadikan tuan rumah berbagai perhelatan atau event internasional, seperti beberapa waktu lalu, event Motogp di Mandalika.

Sehingga layanan informasi cuaca dan iklim secara luas, cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami sangat diperlukan oleh masyarakat, termasuk

wisatawan mancanegara. Tidak berlebihan jika kemudian Komisi V DPR RI mengunjungi stasiun BMKG di NTB. Untuk melihat langsung kesiapan alat dan SDM (sumber daya manusia) yang dimiliki BMMG.

Dalam kesempatan itu Kepala Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Nuga Putrantijo menjelaskan bahwa peralatan yang dimiliki oleh BMKG NTB cukup mumpuni. Dengan proses kalibrasi secara berkala. Sementara untuk sosialisasi terkait cuaca dilakukan dengan berbagai cara seperti rilis pers kepada media massa, media sosial, dan melalui buletin dan majalah BMKG.  **ayu/aha**



# Komisi V Dorong Kesadaran dan Kesigapan Generasi Muda Melalui 'BMKG Goes To School'

**A**nggota Komisi V DPR RI Lasmi Indaryani mendorong adanya program BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) mengenai Kesadaran dan Kesigapan Generasi Muda Melalui BMKG 'Goes To School'. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BMKG sebagai upaya peningkatan mitigasi bencana di antaranya bencana alam dan bencana hidrometeorologi.

"BMKG Goes To School ini juga mengajarkan siswa di sekolah untuk mitigasi bencana gempa bumi, Tsunami, upaya memberikan edukasi dini potensi kebencanaan

kepada pelajar," tutur Lasmi Indaryani saat Kunjungan Kerja Spesifik di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Perlindungan Konsumen kepada Parlemen pada Kamis (25/5).

Di sisi lain, anak-anak dan pelajar memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dan berperan aktif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Dengan pengetahuan yang tepat, mereka dapat membantu menyebarkan informasi kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri sendiri dan orang lain saat terjadi bencana.

"Bagi pelajar ini sangat penting

dan dapat memahami mitigasi bencana selain itu mereka dapat belajar melindungi diri dan orang di sekitarnya terhadap bencana, jadi tidak panik," ungkap Lasmi.

Melalui program BMKG Goes To School, pelajar dapat belajar mengenali tanda-tanda awal gempa bumi dan tsunami, memahami skala intensitas dan dampak yang mungkin terjadi, serta belajar tentang langkah-langkah evakuasi yang sebaiknya dilakukan. Selain itu, pelajar juga dapat diberikan pemahaman mengenai pentingnya kesiapsiagaan dan pembangunan infrastruktur yang tahan gempa serta sistem peringatan dini yang efektif.

"Tidak hanya itu, mereka nanti juga akan memahami tanda-tanda awal gempa bumi dan tsunami, memahami skala intensitas dan dampak yang mungkin terjadi, serta belajar tentang langkah-langkah evakuasi," jelasnya

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi seperti BMKG Goes To School memberikan kesempatan bagi pelajar untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bencana alam dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya persiapan dan respons yang cepat saat bencana terjadi.

"Diharapkan bahwa dengan pengetahuan yang mereka peroleh melalui program ini, pelajar akan menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana," tutupnya.

gys/aha



FOTO: GYS/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi V DPR RI Lasmi Indaryani saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

# Komisi VI Terima Sejumlah Masukan Terkait Kelembagaan Perlindungan Konsumen



FOTOGAL/PDT

Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Perlindungan Konsumen Sarmuji saat foto bersama usai memimpin kunjungan kerja ke Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung.

**T**im Komisi VI DPR RI lewat Panja Penyusunan Naskah Akademis dan RUU Tentang Perlindungan Konsumen melakukan kunjungan kerja ke Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungan ini, Tim Panja mendapatkan sejumlah masukan terutama terkait tentang kelembagaan perlindungan konsumen yang saat ini dinilai belum optimal dalam menyelesaikan permasalahan.

"Banyak sekali masukan yang kita terima dari Unpad, baik berkaitan dengan ketentuan umum maupun detail dari setiap bab yang ada di RUU Perlindungan Konsumen yang sedang kita susun. Misalkan tentang

bagaimana membuat lembaga seperti BPSK dan BPKN itu menjadi lebih efektif dan lebih berdaya. Kalau selama ini kan, BPSK itu antara hidup segan mati tak mau. Jadi harus diputuskan dalam undang-undang ini, kewenangan yang jelas," tutur Sarmuji selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Perlindungan Konsumen kepada **Parlementaria** pada Selasa (23/5).

Masukan terkait perbaikan lembaga ini di antaranya yakni pertama dari Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Arief Bustaman, yang mengharapkan penguatan terhadap peran setiap kelembagaan serta peningkatan penyebaran informasi terkait perlindungan konsumen yang perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Kedua, dari Dosen

Fakultas Hukum Susilowati Suparto, yang menyampaikan perlu adanya perhatian terhadap kewenangan dan koordinasi antar lembaga perlindungan konsumen serta sinergitas keterlibatan pemerintah pusat dan daerah.

Senada dengan masukan-masukan yang didapat, Komisi VI DPR RI pun menganggag perbaikan terhadap kelembagaan perlindungan konsumen ini diperlukan agar dapat menyelesaikan keluhan masyarakat (konsumen) dalam waktu yang singkat tidak bertele-tele. "Masukan yang diterima dari Unpad hari ini cukup banyak, cukup rinci. Mudah-mudahan ini menjadi dasar bagi penyempurnaan RUU Perlindungan Konsumen yang sedang kita susun," ungkap Sarmuji. **gal/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya

# Legislator Dorong Pemerintah Respons Cepat Rencana Jepang Buang Limbah Nuklir ke Samudra Pasifik

**A**nggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah meminta pemerintah untuk serius dalam merespons rencana Pemerintah Jepang yang akan melakukan pembuangan limbah nuklir *Fukushima* ke laut. Pasalnya, hal ini juga akan mengancam perairan Indonesia yakni lingkungan wilayah Samudra Pasifik.

"Kalau pemerintah Jepang benar-benar akan membuang limbah nuklir, ini akan memberikan resiko, dan juga bencana ekologis bagi dunia. Tentu saja, ini akan berdampak sangat serius terhadap perairan Indonesia," ujar Luluk dalam keterangan tertulisnya yang diterima **Parlementaria**, Sabtu (20/5).

Luluk khawatir, dampak dari pembuangan limbah nuklir tersebut menimbulkan dampak negatif terutama pada jangka panjang. "Yang harus kita pahami bahwa, radiasi dan juga dampak dari limbah nuklir ini bisa berlangsung jangka panjang, jadi ini akan mengakibatkan situasi yang sangat buruk, bahkan di tahun-tahun yang akan panjang itu," ucapnya.

Untuk itu, menurutnya Indonesia harus segera secepat mungkin menyatakan sikap menolak rencana pemerintah Jepang tersebut. Serta perlu mengambil bagian penting untuk menggalang kekuatan dari negara Pasifik lainnya. "Demikian juga negara-negara di luar Pasifik agar menolak atau menentang rencana pemerintah Jepang," ucap Politisi Fraksi PKB itu.

Diketahui Pemerintah Jepang berencana melepaskan air limbah yang telah diolah, dengan menyatakan bahwa air limbah tersebut memenuhi standar keamanan internasional. Kemudian merasa langkah tersebut diperlukan karena kurangnya ruang penyimpanan untuk air terkontaminasi.

Namun, masyarakat nasional dan internasional tetap tidak yakin,

dan protes terhadap rencana tersebut dan telah melakukan protes sejak rencana tersebut diumumkan. Pada 13 April 2023, warga Jepang di seluruh negeri berkumpul kembali untuk memprotes keputusan pemerintah yang ingin melepaskan air limbah radioaktif yang telah diolah dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir *Fukushima Daiichi* ke Samudera Pasifik. ➡ gal/rdn

Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah.



FOTO: OJI/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



# EBT Kian Diminati, Pemerintah Diminta Buat Skema Besaran Kapasitas Penggunaannya

**W**akil Ketua Komisi VII DPR RI Doni Maryadi Oekon menilai penggunaan

Energi Baru Terbarukan (EBT) kian diminati masyarakat. Karena itu, ia meminta Pemerintah untuk membuat skema mekanisme yang jelas terhadap besaran penggunaan kapasitas EBT, khususnya bagi industri dan perumahan. Hal itu agar PLN dapat terus memenuhi kebutuhan tersebut.

"Jadi, yang paling betul adalah kapasitas dari industri atau kapasitas dari rumah itu memasang jangan melebihi dari kapasitas. Supaya, di dalam *greed* ini juga listrik kita juga jadi listrik bersih, dan keberadaan tenaga listrik energi baru terbarukan juga di masyarakat juga semakin banyak," katanya usai melakukan pertemuan dengan Direksi dan Jajaran PT. PLN (Persero) UID Jawa Barat, Bandung, Kamis (25/5).

Doni menambahkan, selama ini aturan ekspor impor terhadap Energi Baru Terbarukan juga belum ada kejelasannya. Meskipun semula PLN memiliki *concern* terhadap ekspor impor EBT ini, namun sampai hari ini PLN tidak dapat memproduksi baterai sendiri. Selain itu, ia juga mengingatkan, bahwa arahan Presiden Joko Widodo adalah pada tahun 2035-2060 Indonesia sudah harus *facing out* (berpaling) dari batu bara. Oleh karenanya, diharapkan perlahan Indonesia dapat transfer dari energi



FOTONDI/PDT

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Doni Maryadi Oekon saat memimpin pertemuan dengan Direksi dan Jajaran PT. PLN (Persero) UID Jawa Barat, Bandung, Kamis (25/05/2023).

fosil ke energi baru terbarukan.

Sementara itu terkait dengan rasio elektrifikasi di Jawa Barat, berdasarkan paparan dari PT. PLN (Persero) UID Jawa Barat, Sukabumi merupakan daerah yang memiliki nilai rasio elektrifikasi yang masih rendah.

Menurut Doni, hal ini perlu dipelajari kenapa bisa terjadi. Mengingat daerah Sukabumi juga memiliki pembangkit. Sehingga, hal ini yang perlu dicari tahu apakah rendahnya elektrifikasi tersebut disebabkan oleh jaringan atau sistem yang ada. Namun, secara keseluruhan kinerja PLN UID Jawa

Barat, Komisi VII menilai cukup bagus, hanya saja perlu lebih cepat masuk ke daerah-daerah terpencil agar segera mendapatkan aliran listrik.

"Aliran listrik di desa yang belum sampai kemudian ada swasta yang membuat ini juga memiliki harus dibikin suatu aturan yang jelas. Karena jangan sampai akhirnya masyarakat juga terbebani terlalu berat, *either* ini juga diatur dengan peraturan yang jelas berapa mereka boleh jualannya atau cepat pemerintah masuk ke dalam daerah itu untuk listrik di daerah itu," tutupnya. **ndy/rdn**



# UU Migas Perlu Direvisi untuk Tingkatkan Iklim Investasi

**P**emerintah telah menargetkan *lifting* minyak bumi sebesar 1 juta barel per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) pada tahun 2030. Setidaknya, Pemerintah membutuhkan investasi di sektor hulu migas sebesar USD 160 Miliar dalam kurun waktu 10 tahun mendatang hingga 2030.

Untuk itu, dibutuhkan upaya kuat dalam meningkatkan iklim investasi migas di Indonesia melalui penyempurnaan dasar kebijakan UU Migas. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat pidato sambutan FGD Komisi VII DPR RI bersama SKK Migas yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (25/5) lalu.

"Terlebih lagi, realisasi *lifting* minyak bumi pada tahun 2022 berada di bawah target yaitu sebesar 612 ribu BOPD atau sebesar 87 persen dibanding target yang ditetapkan. Realisasi migas bumi tahun 2022 juga berada di bawah target yaitu sebesar 940 ribu BOEPD atau 90,68 persen dibanding target yang ditetapkan," ujar Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, di Jakarta, Minggu (28/5).

"Kemudian daya tarik investasi migas di Indonesia saat ini mengalami tren penurunan. Internal Rate of Return (IRR) sektor migas di Indonesia masih jauh berada di bawah IRR global yaitu sebesar 10,4%," sambung Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Saat ini, lanjut Bambang, tata kelola migas di Indonesia sudah diatur oleh UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 menggantikan UU Pertamina Nomor 8 Tahun 1971.

Namun demikian, Komisi VII DPR RI berpandangan bahwa dalam implementasinya UU Migas telah menimbulkan berbagai persoalan hukum.

Salah satunya, ungkap Bambang, UU tersebut telah dilakukan beberapa kali pengujian di MK dan telah terdapat putusan MK terhadap UU Migas yang mewakili

dua isu penting yaitu tentang sistem penyelenggaraan atau pengelolaan migas dan mengenai lembaga pengelola migas sebagai implementasi dari konsep dikuasai negara.

"Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan migas di Indonesia, maka Komisi VII DPR RI periode ini memandang perlu menyempurnakan dasar kebijakan dengan melakukan perubahan UU Migas," pungkas Bambang.

— pun/rdn



**BERDASARKAN BEBERAPA PERMASALAHAN YANG TERJADI BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN MIGAS DI INDONESIA, MAKA KOMISI VII DPR RI PERIODE INI MEMANDANG PERLU MENYEMPURNAKAN DASAR KEBIJAKAN DENGAN MELAKUKAN PERUBAHAN UU MIGAS.**



FOTO: PUN/PDT

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (25/5/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



# Miliki Potensi Besar, Komisi VII Dukung Eksplorasi *Slime Hole* Panas Bumi di Sukabumi

**K**etua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mendorong eksplorasi dan pengeboran *slimhole* di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi mengingat besarnya potensi panas bumi di daerah tersebut. Hal ini dikatakannya, sebab menurut data yang diterimanya terdapat dua titik pengeboran yang telah dilakukan di Sukabumi belum maksimal.

"Di sini ada proyek panas bumi, di mana itu merupakan bagian dari kebijakan, bagaimana negara dalam hal ini Kementerian ESDM mengambil tanggung jawab mengurangi resiko eksplorasi, maka di Cisolok ini telah dilakukan eksplorasi dengan juga mengebor di dua titik yang pertama ngebor 220 meter yang kedua bisa mengukur sampai tingkat kedalaman 800 meter memang belum sampai titik ideal karena titik idealnya di angka di atas 1.500 meter dan bisa jadi 2.000 meter. Tetapi yang jelas ada potensi di kawasan tersebut meskipun belum dapat gambaran *approvalment*," jelas Sugeng usai memimpin Kunjungan Spesifik Komisi VII di Jawa Barat, Jumat, (26/5).

Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem ini, potensi panas bumi di Sukabumi, dan Indonesia umumnya sangat besar dan hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan dengan optimal. Diketahui, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang diperkirakan sekitar 24 GW, namun baru bisa dimanfaatkan sekitar 2.130 MW yang berasal dari 16 PLTP pada 14 WKP atau pemanfaatannya baru sekitar 8,9% dari total sumber daya

(potensi) yang dimiliki. Untuk tahun 2020, pemerintah menargetkan kapasitas terpasang untuk panas bumi sebesar 2.270,7 MW.

Namun demikian, dengan tegas Sugeng mengungkapkan eksplorasi ini harus tetap dengan pendekatan ESG (*Environmental, Social and Governance*). Apalagi mengingat di sekitar daerah proyek panas bumi ini terdapat wilayah geopark, dan konservasi flora dan fauna.

"Jadi masalah lingkungan yang kita bahas, dari sisi konservasi, tumbuhan kalau ditebang satu harus ditanam seratus dan seterusnya, sehingga keberadaan pembangkit listrik panas bumi itu secara ekonomi itu bagus tetapi secara ekologi juga harus menjadi perhatian utama," jelasnya.

Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan keperluan terhadap energi terbarukan ini sangat penting guna mencegah terjadi perubahan iklim. Upaya ini juga dilakukan demi mengurangi energi fosil yang mendominasi dalam mendukung energi kelistrikan

dunia dan menurunkan emisi karbon.

"Cepat atau lambat akan kita kurangi (penggunaan energi fosil) sehingga sampai titik optimal 2060 *net zero emission*. Panas bumi merupakan energi yang besar sekali potensinya di Indonesia termasuk juga tenaga angin, karena di sini anginnya itu sampai wilayah Garut itu sangat besar, sehingga sangat-sangat mungkin bisa juga dimanfaatkan," tutupnya.

**we/aha**



FOTO:WE/PDT

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin pertemuan Kunjungan Spesifik Komisi VII di Jawa Barat, Jumat, (26/5/2023).





# Putih Sari Minta Pemda Indramayu Berikan Perlindungan terhadap PMI

**B**ekerja ke luar negeri masih menjadi magnet memikat bagi Warga Kabupaten Indramayu. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu, pada April 2023, sebanyak 5.937 warga Kabupaten Indramayu mendaftar menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri.

Tingginya jumlah warga Kabupaten Indramayu yang berangkat menjadi PMI ke luar negeri menjadi perhatian Komisi IX DPR RI. "Kabupaten Indramayu menjadi salah satu kantong terbesar penempatan PMI di Indonesia. Sehingga, perlu terus dilakukan pengawasan," kata Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari baru baru ini di Indramayu, Jawa Barat.

Lanjut Putih, pengawasan penting terus dilakukan untuk memastikan agar PMI dilindungi dari berbagai tindakan negatif. Hal itu seperti perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

"Untuk itu, kami ingin mengetahui Perlindungan terhadap PMI, dari sejak awal perekrutan (calon PMI), sampai kembali lagi ke tanah air (purna PMI)," ungkapnya

Legislator Gerindra itu menambahkan persoalan perlindungan harus menjadi prioritas utama dari para pemangku kebijakan, baik swasta, Perwakilan Perusahaan Penempatan Pekerja

Migran Indonesia (P3MI) maupun pemerintah.

"Kami ingin menghimpun data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan terkait peran Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan PMI di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Indramayu. Serta mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kebijakan yang telah dan akan ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Indramayu dalam upaya memaksimalkan peran Pemerintah Daerah terhadap PMI," tambahnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Indramayu Rinto Waluyo mengungkapkan Sistem pengawasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan PMI. Unsur Satgas ini di antaranya Dinas Provinsi dan Kab./Kota yang membidangi ketenagakerjaan, Kepolisian, Imigrasi, Kejaksaan dan stakeholder lainnya. Satgas ini mempunyai tugas melaksanakan pengawasan PMI serta memastikan pemenuhan regulasi dan perlindungan hak-hak pekerja migran. rnm/rdn



FOTO: RIA/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di Indramayu, Jawa Barat.

Scan QR untuk berita selengkapnya



# M. Nur Purnamasidi Sarankan Permasalahan Guru PPPK Diambil Alih Pemerintah Pusat

**A**nggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyarankan agar seluruh permasalahan Guru PPPK yang ada di daerah, diambil alih oleh pemerintah pusat agar mendapatkan penyelesaian yang maksimal. Hal ini disampaikan Nur Purnamasidi untuk menanggapi ketidakjelasan terhadap nasib formasi Guru PPPK yang ada di daerah.

"Kita harus punya kesimpulan bahwa sementara ini urusan yang kita mulai tahun 2021 (tentang PPPK) tertarik semua ke Jakarta, kita selesaikan di Jakarta, baru kalau itu sudah selesai, baru kemudian yang (formasi) reguler itu yang umum tadi baru kita mulai lagi," ujar Nur Purnamasidi dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (24/5).

Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar ini, seleksi Guru PPPK ini harus mendapatkan penyelesaian sesegera mungkin, agar tidak ada kekhawatiran bagi calon guru PPPK lainnya. Maka, Nur Purnamasidi menekankan agar semua persoalan itu dapat diselesaikan. Hal itu dapat dimulai dari persoalan seleksi dan formasi pada tahun 2021 hingga 2023 ini, sebelum lowongan dibuka kembali.

"Apalagi ini ada penambahan 600 sekian ribu lagi, kan gitu. Jangan sampai pembukaan ini nanti akan membuka lagi masalah baru lagi karena persepsi antar K/L belum terjadi. Walaupun ada beberapa sudah terjadi, kemudian persepsi

”

**KITA HARUS PUNYA KESIMPULAN BAHWA SEMENTARA INI URUSAN YANG KITA MULAI TAHUN 2021 (TENTANG PPPK) TERTARIK SEMUA KE JAKARTA, KITA SELESAIKAN DI JAKARTA, BARU KALAU ITU SUDAH SELESAI, BARU KEMUDIAN YANG (FORMASI) REGULER ITU YANG UMUM TADI BARU KITA MULAI LAGI.**

daerah pun juga enggak sama," jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Di akhir penyampaian, Nur Purnamasidi mengingatkan agar jangan sampai nantinya masalah Guru PPPK ini menjadi warisan masalah di pemerintahan yang akan datang. "Jadi itu mungkin pimpinan bagi saya persoalan sudah jelas dan sekarang bagaimana kita menyelesaikannya. Menurut saya misalnya ditarik semua ke pusat dulu dan saya yakin kalau di pusat (selesai) enggak lebih dari dari setengah tahun," tutup Nur Purnamasidi.

we/rdn



FOTO: DPR/PDT

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi saat Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Pertandingan Timnas Indonesia Versus Argentina Momentum Kebangkitan Sepak Bola Tanah Air

**W**akil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai pertandingan Tim Nasional (Timnas) Indonesia versus Argentina yang akan berlangsung pada 19 Juni 2023 mendatang, akan menjadi momentum kebangkitan sepak bola tanah air. Sehingga, pertandingan ini bukan hanya soal menang-kalah, tetapi menjadi kesempatan Indonesia untuk bangkit kembali dari keterpurukan.

"Sepak bola kita pernah di sanksi FIFA pada 2015, kemudian ada Tragedi Kanjuruhan, Liga 2 dan Liga 3 dibubarkan, dan terakhir adalah batal menyelenggarakan FIFA World Cup U20. Dan berbagai peristiwa lain, yang mungkin menjadikan Indonesia dipandang 'bermasalah' dalam dunia sepak bolanya," ujar Hetifah dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, Kamis (25/5).

Diketahui, Argentina merupakan juara piala dunia sepak bola 2022. Tim yang memiliki pemain terbaik dunia, seperti Lionel Messi itu pun telah lima kali masuk di final Piala Dunia dengan dua di antaranya tercatat meraih gelar juara. Kini tim berjuluk La Albicelestes itu direncanakan akan tanding melawan Timnas Indonesia yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno.

Di sisi lain, Timnas Sepak Bola Indonesia baru saja mendapatkan medali emas di ajang SEA Games 2023 Kamboja. "Sehingga, prestasi emas sepak bola putra di SEA Games menunjukkan bahwa prestasi kita sudah berada pada jalur yang tepat, selanjutnya melawan Argentina ini harus dijadikan untuk menunjukkan

”

**SEHINGGA, PRESTASI EMAS SEPAK BOLA PUTRA DI SEA GAMES MENUNJUKKAN BAHWA PRESTASI KITA SUDAH BERADA PADA JALUR YANG TEPAT, SELANJUTNYA MELAWAN ARGENTINA INI HARUS DIJADIKAN UNTUK MENUNJUKKAN KESERiusAN INDONESIA MEMPERBAIKI SEPAK BOLA.**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI  
Hetifah Sjaifudian.

keseriusan Indonesia memperbaiki sepak bola," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Hetifah tidak menampik bahwa peringkat sepak bola Indonesia jauh berada di bawah Argentina, yaitu Indonesia peringkat 149 dunia dan Argentina peringkat 1 dunia. Meskipun demikian, tegasnya, ini merupakan pertandingan kesempatan yang baik bagi tim Indonesia untuk menguji kemampuan dan memperoleh pengalaman.

"Pertandingan sepak bola selalu menarik karena segala sesuatu bisa saja terjadi di lapangan. Tunjukkan bahwa Indonesia bisa!" tutupnya.

— rdn



FOTO: DEP/PTD

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Komisi XI Minta OJK Maksimalkan Realisasi Anggaran Terkait Pengawasan Sesuai Tupoksi

**K**omisi XI DPR RI menyoroti realisasi anggaran kegiatan operasional OJK terutama dalam hal pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi utama OJK yang dinilai belum optimal. Untuk itu, OJK diminta untuk memaksimalkan kinerjanya dalam hal pengawasan terlebih saat ini masih banyak kasus-kasus di sektor jasa keuangan yang belum terselesaikan.

Diketahui, realisasi Anggaran OJK sampai bulan April 2023 ini adalah sebesar 40,34 persen dan sejatinya telah cukup optimal. Namun, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan melihat ada ketimpangan di mana realisasi kegiatan administratif telah mencapai 46,23 persen serta pengadaan aset sebesar 12,54 persen sementara kegiatan operasional hanya 17,95 persen.

"Dengan kondisi tersebut, kondisi ini, ini publik bisa mengambil kesimpulan yang kurang tepat, di mana OJK terdapat mendahulukan realisasi anggaran remunerasi dibanding kinerja-kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang," jelas Heri dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), di Ruang Rapat Kerja Komisi XI, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/5).

Heri menambahkan bila diamati lebih dalam terdapat beberapa kegiatan pengawasan yang

realisasinya jauh dari ideal. Hal itu seperti pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan baru mencapai sebesar 9,9 persen serta edukasi dan perlindungan konsumen baru sebesar 4,5 persen. Politisi Fraksi Partai Gerindra itu pun berharap OJK dapat memperbaiki dan lebih mengoptimalkan kinerjanya di triwulan berikutnya.

Senada dengan Heri, Anggota Komisi XI Fauzi H. Amro pun turut meminta OJK untuk lebih memaksimalkan anggarannya terkait hal pengawasan sesuai dengan tupoksinya. "Bahwa dalam konteks realisasi anggaran, realisasi anggaran ini kan satu. Menurut saya

harus mencerminkan bahwa OJK ini adalah badan pengawasan, itu tidak lebih dari itu. Karena pengawasan terhadap banyak hal seperti itu asuransi, perbankan, IKNB sampai ke pasar modal," tuturnya.

Selain laporan pelaksanaan anggaran, Legislator Fraksi Partai NasDem itu juga meminta OJK untuk memberikan laporan terkait pengawasan serta penanganan terkait kasus-kasus yang terjadi pada pelaku jasa keuangan seperti kasus tentang sebelas asuransi yang bermasalah dan kasus perbankan yakni kebocoran data nasabah Bank BSI. [gal/rdn](#)



FOTO: MCMN/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat mengikuti Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/03/2023).



# Revisi UU Ombudsman RI Untuk Perkuat Tupoksi Lembaga

**A**nggota Badan Legislati (Baleg) DPR RI John Kenedy Azis mendorong penguatan lembaga Ombudsman Republik Indonesia (RI) lewat pembaruan Undang-Undang (UU) yang sebelumnya sudah berumur 15 tahun. Ia menilai keberadaan lembaga itu perlu diperkuat dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas

”

**KITA PERLU PERKUAT LEMBAGA OMBUDSMAN INI AGAR LEBIH BERARTI. SEBAB BANYAK TEMUAN PENYIMPANGAN TERJADI, TAPI TIDAK BISA SECARA KONKRET DIPERBAIKI, SOALNYA SIAPA YANG KASIH SANKSI?**

dan berjalan dengan baik.

”Kita perlu perkuat lembaga Ombudsman ini agar lebih berarti. Sebab banyak temuan penyimpangan terjadi, tapi tidak bisa secara konkret diperbaiki, soalnya siapa yang kasih sanksi?” ujarnya ditemui usai rapat pleno Baleg DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Kamis (25/5).

Rapat pleno itu membahas penyempurnaan draf RUU tentang Perubahan atas UU No: 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. “Mudah-mudahan dengan perubahan undang-undang ini dapat bekerja sesuai dengan yang kita harapkan,” ujar John.

Dalam rapat itu ia sempat menyampaikan bahwa tupoksi yang baik akan membantu Ombudsman menjalankan aktivitasnya dengan. Tidak hanya sekedar disegani, sebab kinerja yang positif dan terbukti profesional menjadi tolak ukur disegani atau tidaknya keberadaan lembaga tersebut.

John juga menyoroti soal temuan-temuan dari berbagai lembaga pemerintah dengan fungsi pengawasan yang tak jarang dihiraukan lembaga lainnya, karena minim sanksi dan penindakan. Oleh karena itu ia mendorong agar beleid baru soal lembaga Ombudsman RI dapat ditelurkan dengan sebaik-baiknya, supaya mencetak temuan yang ada dalam rangka pengawasan dan peningkatan kinerja setiap lembaga yang diawasi. **aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Badan Legislati (Baleg) DPR RI John Kenedy Azis saat rapat pleno Baleg DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Kamis (25/5/2023).

FOTO: EOT/PPT

# Soal RUU Kesehatan, Legislator Tekankan Pasal Zat Adiktif Tidak Boleh Digabung Dengan Narkoba

**A**nggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengatakan pada dasarnya pembuatan undang-undang yang dapat dilaksanakan tidak boleh diskriminatif, seperti halnya RUU Kesehatan yang tengah dibahas. Dimana terdapat upaya penyamaan tembakau sebagai zat adiktif yang setara dengan narkoba, hal itu tengah menjadi sorotan banyak kalangan.

Menurut Firman, tembakau adalah tanaman yang dimanfaatkan oleh industri sah serta legal di negeri

”

**ADI KALAU MEMANG MAU MENGATUR KOMODITAS, MARI KITA BUAT REGULASI SOAL KOMODITAS TERKAIT. SEBAB YANG NAMANYA KOMODITAS SEMUA ADA DAMPAKNYA MASING-MASING.**

ini. Apalagi tembakau merupakan komoditas yang diperdagangkan di pasar oleh masyarakat. "Jadi kalau memang mau mengatur komoditas, mari kita buat regulasi soal komoditas terkait. Sebab yang namanya komoditas semua ada dampaknya masing-masing," ungkapnya saat acara Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Nusantara III, Kamis (25/5).

Firman menyayangkan hal itu, apalagi tembakau memiliki dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Cukai yang disumbangkan mencapai ratusan triliun, belum pula industri tembakau dan turunannya diperkirakan mampu menyerap 5 juta tenaga kerja secara nasional.

"Tembakau jangan dilihat dari dampak negatifnya saja, karena positifnya juga ada," sebut Politisi Fraksi Partai Golkar ini. Bahkan tak sedikit beberapa penelitian menemukan manfaat tembakau bagi kesehatan, namun demikian Firman juga tak memungkiri diperlukan pula pengawasan dan regulasi yang baik.

Adapun fokus dan latar belakang penyusunan RUU Kesehatan memiliki muatan yang lebih luas. Firman mengingatkan bahwa calon beleid yang bermetodekan omnibus law ini diinisiasi karena melihat tata kelola kesehatan di tengah masyarakat belum berjalan dengan baik. Sehingga parlemen berkonsentrasi agar RUU ini dapat menjawab tantangan tata kelola tersebut.

[aha,auf,hfl/aha](#)



FOTO: ENO/PDT

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo saat menjadi pembicara dalam acara Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Nusantara III, Kamis (25/5/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Perkuat Hubungan Diplomasi, Setjen DPR Terima Kunjungan Kehormatan Duta Besar Rumania

**S**ekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menerima kunjungan kehormatan (*courtesy call*) Duta Besar Rumania untuk Indonesia H.E Dan Adrian Balanescu. Selama pertemuan berlangsung, masing-masing perwakilan membahas penguatan hubungan diplomasi. Satu di antaranya terkait persiapan agenda kunjungan Ketua Parlemen beserta Perdana Menteri Rumania ke Indonesia.

Menanggapi agenda tersebut, Indra menekankan akan mempersiapkan sumber daya sebaik-baiknya agar pertemuan resiprokal (balasan) ini berlangsung sesuai harapan. "Kita akan akan mempersiapkan pertemuan ini secara baik. Kegiatan yang sifatnya resiprokal. (Sebelumnya) mereka menyambut dengan ramah, (maka) kita juga akan melakukan hal tersebut secara baik," ucap Indra kepada **Parlementaria** usai menerima kunjungan kehormatan tersebut di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (26/5).

Sebagai informasi, Ketua Parlemen beserta Perdana Menteri Rumania direncanakan akan mengunjungi Indonesia pada 10-15 Juni 2023 mendatang. Dilaksanakan di Jakarta dan Bali, kunjungan ini bertujuan tidak hanya mempererat hubungan diplomasi antar legislatif antar kedua negara akan tetapi juga hubungan antar eksekutif.

"Tentunya, hubungan antara Indonesia dengan Rumania memang



FOTO: ENO/PDT

**Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar saat menerima kunjungan kehormatan (*courtesy call*) Duta Rumania untuk Indonesia H.E Dan Adrian Balanescu di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (26/5/2023).**

”  
**TENTUNYA,  
HUBUNGAN  
ANTARA INDONESIA  
DENGAN RUMANIA  
MEMANG SUDAH  
TERJALIN BAIK.  
SALAH SATU YANG  
DIINGINKAN OLEH  
DELEGASI RUMANIA  
(SAAT BERKUNJUNG  
KE INDONESIA  
NANTI).**

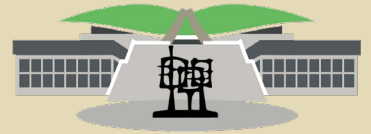
sudah terjalin baik. Salah satu yang diinginkan oleh delegasi Rumania (saat berkunjung ke Indonesia nanti) adalah mereka ingin sekali bisa melihat Taman Mini Indonesia Indah, kita akan persiapan itu secara baik," pungkas Indra.

Diketahui, sebelumnya pada tanggal 23-27 Oktober 2022, delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI yang dipimpin oleh Nurul Arifin berkunjung ke Bucharest, Rumania. Tujuan kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan atas kunjungan GKSB Parlemen Rumania ke Indonesia pada bulan April 2022.

ts/rdn

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya





**Kepala Biro SDMA Setjen DPR RI Asep Ahmad Saefuloh saat foto bersama usai melepas delapan pegawai negeri sipil yang akan melakukan ibadah haji di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal.**  
FOTO: PRIMA



**Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini saat foto bersama usai acara Sosialisasi Single Account ISBN di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (24/5/2023).** FOTO: FHN/PDT



**Anggota DPR RI Dapil Kalsel Difriadi Darjat foto bersama usai saat pertemuan dengan rombongan Setwan DPRD Kalsel di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (25/5/2023).** FOTO: MRI/PDT

